

Pengaruh beberapa sektor ekonomi terhadap pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah

Rizqi Safitri^{1*}, Priyagus², Yana Ulfah³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

*Email: rizqisafitri91@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB sektor ekonomi (pertambangan, konstruksi, perdagangan dan industri pengolahan / manufaktur) terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini adalah penelitian hubungan, yang menganalisis pengaruh variabel Independen terhadap variabel Dependent. Variabel yang digunakan adalah variabel PDRB Pertambangan, PDRB Industri, PDRB Kontruksi, PDRB Perdagangan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan PDRB Pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah. PDRB Industri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. PDRB Kontruksi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. PDRB Perdagangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah. PDRB Pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Daerah. PDRB Industri Manufaktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah. PDRB Kontruksi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah. PDRB Perdagangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung menurun. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung meningkat.

Kata Kunci: Pajak daerah; retribusi daerah; pendapatan asli daerah; produk domestik regional bruto; sektor pertambangan; sektor industri; sektor kontruksi; sektor perdagangan

The influence of several economic sectors on taxes, levies and local revenue

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of GRDP in the economic sector (mining, construction, trade and processing/manufacturing industry) on local tax revenues and regional levies to increase Regional Original Income in East Kalimantan Province. This research is a relationship research, which analyzes the effect of the independent variable on the dependent variable. The variables used are the GRDP of Mining, GRDP of Industry, GRDP of Construction, GRDP of Trade on Regional Taxes and Regional Retribution on Regional Original Income in the Province of East Kalimantan. The results of the study show that Mining GRDP has a positive and significant effect on Regional Taxes. Industrial GRDP has a negative and insignificant effect on Regional Taxes. GRDP Construction has a positive and insignificant effect on Regional Taxes. GRDP of Trade has a negative and insignificant effect on Regional Taxes. Mining GRDP has a positive and significant effect on regional levies. The GRDP of the Manufacturing Industry has a positive and insignificant effect on regional levies. GRDP of construction has a positive and insignificant effect on regional levies. GRDP of Trade has a positive and insignificant effect on regional levies. The contribution of Regional Taxes to Regional Original Income tends to decrease. The contribution of regional levies to regional original income tends to increase.

Keywords: *local tax; regional retribution; locally-generated revenue; Gross Regional Domestic Product; mining sector; industrial sector; construction sector; trade sector on construction sector; trade sector*

PENDAHULUAN

Menurut Zhouhaier (2011) pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintahdaerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk hubungan kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Aibieyi (2013) menyatakan bahwa pembangunan seharusnya memang berasal dari dalam, yang datang melalui kehendak dan keinginan orang-orang didalamnya.

Peran Pemerintah Daerah dalam era otonomi sangat besar karena dituntut kemandiriannya dalam melaksanakan fungsi dan memberlakukan pembiayaan seluruh kegiatan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. PAD dapat diperoleh dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang dikelola ataupun yang berpotensi untuk dipungut pajak daerah agar dapat digunakan secara efisien dan efektif (Arsana, 2013).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah, artinya penerimaan pajak daerah digunakan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana sektor publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori dimana pajak daerah ini masuk kedalam faktor-faktor produksi khususnya akumulasi modal. Apabila penerimaan pajak meningkat maka akan meningkatkan output berupa barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) karena pajak daerah ini digunakan sebagai modal untuk kegiatan produksi yang akan menghasilkan output berupa barang maupun jasa.

Selain pajak daerah, retribusi juga merupakan komponen penting dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Darise, 2009).

Berdasarkan data yang ada apabila penerimaan retribusi meningkat maka akan meningkatkan output berupa barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB).

Penelitian Terdahulu

Dwi Sundi Marliyanti (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh secara langsung terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Denpasar, Pajak Daerah berpengaruh secara langsung terhadap PAD Kota Denpasar, dan PDRB berpengaruh secara tidak langsung terhadap PAD melalui Pajak Daerah Kota Denpasar.

Suyatno (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jamkesmas terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Sragen Tahun 2007-2009. Hasil Penelitian Menunjukkan PDRB Berpengaruh Signifikan dan positif Terhadap

retribusi Pelayanan Kesehatan. Jumlah Penduduk Berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Reniwati (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Sektor Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Analisis Shift Share menunjukkan bahwa sektor yang berkembang pesat adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan persewaan, serta jasa- jasa.

Fadhila Thunnis, (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bukit Tinggi. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa variabel PDRB dan Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Bukit Tinggi.

Dwi Julia Mutiara (2015) melakukan penelitian tentang Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Provnsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif secara statistik terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Ni Putu Ari Kusumayanti (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten di Bali di Luar Wilayah Sarbagita. Terdapat tiga sektor potensial di Kabupaten Karangasem yaitu Sektor Pertanian, Sektor Kehutanan dan Sektor Kontruksi dalam berkontribusi terhadap PAD ataupun Retribusi.

Diyan Apriliya Susanti (2017) melakukan penelitian tentang Analisis Potensi Retribusi Pasar dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karang Anyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam meningkatkan PAD.

METODE

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan perluasan atau perpanjangan digunakan untuk menaksirkan hubungan antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk menguji besarnya kontribusi masing-masing variabel Independen terhadap variabel dependen. (Sujarweni, 2016)

Penggunaan regresi linier berganda untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel independen dan variabel dependen sehingga dapat membedakan kedua variabel dalam penelitian. Analisis regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: (Sujarweni, 2016)

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon_1$$

Dimana:

- Y : Variabel Y
- X₁ : Variabel X1
- X₂ : Variabel X2
- X₃ : Variabel X3
- X₄ : Variabel X4
- β : Koefisien regresi yang akan diestimasi
- ε₁ : Terms of error atau kesalahan pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Persamaan I Pengaruh PDRB Sektor Pertambangan (X₁), PDRB Sektor Industri Manufaktur (X₂), PDRB Sektor Kontruksi (X₃), PDRB Sektor Perdagangan Terhadap Pajak Daerah (Y₁)

Tabel 1. Variabel Y₁, Pajak Daerah Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.942 ^a	.888	.814	.08406	.888	11.908	4	6	.005	2.187

a. Predictors: (Constant), PDB Perdagangan, PDB Pertambangan, PDB Industri Manufaktur, PDB Kontruksi

b. Dependent Variable: Pajak Daerah

Dari Tabel 1, tersebut menjelaskan besarnya Koefisien Korelasi R Sebesar 0,942 dan Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,888. Hal ini menandakan bahwa variabel bebas (PDRB Sektor Pertambangan, PDRB Sektor Industri Manufaktur, PDRB Sektor Kontruksi, PDRB Sektor Perdagangan) memberikan pengaruh sebesar 0,888 atau 88,8 persen terhadap variabel terikat Pajak Daerah (Y₁). Sedangkan sisanya sebesar 0,112 atau 11,2 persen dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Artinya, bahwa keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam meningkatkan pengaruh Pajak Daerah.

Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0,888 oleh karena itu berdasarkan nilai koefisien determinasi (R²) berada diantara nilai 0,80 sampai dengan 1,00 yang menjelaskan hubungan sangat kuat atau model dapat diandalkan.

Untuk melihat pengaruh variabel Independent (X) keseluruhan terhadap variabel Y1, dapat dilihat dari hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 2. ANOVA^b Persamaan I

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.337	4	.084	11.908	.005 ^a
Residual	.042	6	.007		
Total	.379	10			

a. Predictors: (Constant), PDB Perdagangan, PDB Pertambangan, PDB Industri Manufaktur, PDB Kontruksi

b. Dependent Variable: Pajak Daerah

Uji Secara Simultan

Dari tabel 5.10. Anova, hasil analisis Pengaruh PDRB Pertambangan, PDRB Industri Manufaktur, PDRB Kontruksi, PDRB Perdagangan terhadap Pajak Daerah secara simultan dilakukan dengan signifikansi $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$ maka Hipotesis di terima (menolak H_0 dan menerima H_1). Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikan $0,05$ maka Hipotesis ditolak (menerima H_0 dan menolak H_1). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh F_{hitung} sebesar 11,908 dengan signifikan 0,005 sedangkan F_{tabel} diperoleh sebesar 3,520 dengan demikian diketahui ($F_{hitung} 11,908 > F_{tabel} 3,520$) maka model layak digunakan atau model dapat digunakan.

Dari hasil Signifikan F tersebut menunjukkan besarnya nilai signifikansi 0,005 bila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 maka nilai sig 0,005, $p < 0,05$; Sehingga dapat disimpulkan dari hasil analisis tersebut menolak H_0 , atau dengan kata lain model dapat digunakan.

Uji Secara Parsial (Uji t)

Selanjutnya untuk melihat pengaruh variabel secara parsial:

Tabel 3. Variabel Y1, Pajak Daerah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	8.492	1.017			8.352	.000
PDB Pertambangan	.035	.009	.729		3.829	.009
PDB Industri Manufaktur	-.040	.023	-1.244		-1.756	.130
PDB Kontruksi	.069	.097	.615		.704	.508
PDB Perdagangan	-.052	.029	-1.109		-1.787	.124

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

Pengujian yang dilakukan uji t (critical ratio) , $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikan $< 0,05$ maka Hipotesis diterima (menolak H_0 dan menerima H_1) atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ nilai signifikan $0,05$ maka Hipotesis ditolak (menerima H_0 dan menolak H_1), dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} berikut:

Pengaruh PDRB Pertambangan (X1) terhadap Pajak Daerah (Y1). Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Pertambangan (X1) sebesar 0,035 jalur ini berpengaruh positif dan signifikan karena nilai t_{hitung} sebesar 3,829 sementara t_{tabel} sebesar 1,476 ($t_{hitung} = 3,829 > t_{tabel} = 1,476$), dengan demikian pada pola hubungan langsung ini, PDRB Pertambangan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah, yang didukung oleh Probability Value (sig) 0,009, $p < 0,05$. Jika PDB Pertambangan naik 1 persen, maka Pajak Daerah akan meningkat sebesar 0,035 persen;

Pengaruh PDRB Industri Manufaktur (X2) terhadap Pajak Daerah (Y1). Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Industri Manufaktur (X2) sebesar -0,040 jalur ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena nilai t_{hitung} sebesar -1,756 sementara t_{tabel} sebesar 1,476 ($t_{hitung} = -1,756 < t_{tabel} = 1,476$), dengan demikian pada pola hubungan langsung ini, PDRB Industri Manufaktur berpengaruh tidak signifikan terhadap Pajak Daerah, yang didukung oleh Probability Value (sig) 0,130, $p > 0,05$. Jika PDB Industri Manufaktur naik 1 persen, maka Pajak Daerah akan menurun sebesar 0,040 persen;

Pengaruh PDRB Kontruksi (X3) terhadap Pajak Daerah (Y1). Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Kontruksi (X3) sebesar 0,069 jalur ini berpengaruh positif dan tidak signifikan karena nilai t_{hitung} sebesar 0,704 sementara t_{tabel} sebesar 1,476 ($t_{hitung} = 0,704 < t_{tabel} = 1,476$), dengan demikian pada pola hubungan langsung ini, PDRB Kontruksi berpengaruh tidak signifikan terhadap Pajak Daerah, yang didukung oleh Probability Value (sig) 0,508, $p > 0,05$. Jika PDB Kontruksi naik 1 persen, maka Pajak Daerah akan meningkat sebesar 0,069 persen; dan

Pengaruh PDRB Perdagangan (X4) terhadap Pajak Daerah (Y1). Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Perdagangan (X4) sebesar -0,052 jalur ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena nilai t_{hitung} sebesar -1,787 sementara t_{tabel} sebesar 1,476 ($t_{hitung} = -1,787 < t_{tabel} = 1,476$), dengan demikian pada pola hubungan langsung ini, PDRB Kontruksi berpengaruh tidak signifikan terhadap Pajak Daerah, yang didukung oleh Probability Value (sig) 0,124, $p > 0,05$. Jika PDB Perdagangan naik 1 persen, maka Pajak Daerah akan menurun sebesar 0,052 persen.

Hasil Analisis Persamaan II Pengaruh PDRB Sektor Pertambangan (X1), PDRB Sektor Industri Manufaktur (X2), PDRB Sektor Kontruksi (X3), PDRB Sektor Perdagangan Terhadap Retribusi Daerah (Y2)

Tabel 4. Variabel Y2, Retribusi Daerah
Model Summary^b

Model R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Sig. F Change	Durbin-Watson	
				R Square Change	F Change	df1	df2			
1	.873 ^a	.763	.605	.17611	.763	4.829	4	6	.044	1.819

a. Predictors: (Constant), PDB Perdagangan, PDB Pertambangan, PDB Industri Manufaktur, PDB Kontruksi
b. Dependent Variable: Retribusi Daerah

Dari Tabel tersebut menjelaskan besarnya Koefisien Korelasi R Sebesar 0,873 dan Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,763. Hal ini menandakan bahwa variabel bebas (PDRB Sektor Pertambangan, PDRB Sektor Industri Manufaktur, PDRB Sektor Kontruksi, PDRB Sektor Perdagangan) memberikan pengaruh sebesar 0,763 atau 76,3 persen terhadap variabel terikat Retribusi Daerah (Y₂). Sedangkan sisanya sebesar 0,237 atau 23,7 persen dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Artinya, bahwa keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam meningkatkan pengaruh Retribusi Daerah. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,769 oleh karena itu berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) berada diantara nilai 0,60 sampai dengan 0,79 yang menjelaskan hubungan kuat atau model dapat diandalkan.

Pengaruh Variabel Independent (X) secara keseluruhan terhadap variabel Y2, dapat dilihat dari hasil uji F tabel ANOVA^b sebagai berikut:

Tabel 5. Variabel Y2, Retribusi Daerah
ANOVA^b Persamaan II

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.599	4	.150	4.829	.044 ^a
	Residual	.186	6	.031		
	Total	.785	10			

a. Predictors: (Constant), PDB Perdagangan, PDB Pertambangan, PDB Industri Manufaktur, PDB Kontruksi
b. Dependent Variable: Retribusi Daerah

Uji Secara Simultan

Dari tabel diatas Anova, hasil analisis Pengaruh PDRB Pertambangan, PDRB Industri Manufaktur, PDRB Kontruksi, PDRB Perdagangan terhadap Retribusi Daerah secara simultan dilakukan dengan signifikansi $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$ maka Hipotesis di terima (menolak H_0 dan menerima H_1). Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikan $0,05$ maka Hipotesis ditolak (menerima H_0 dan menolak H_1). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh F_{hitung} sebesar 4,829 dengan signifikan 0,044 sedangkan F_{tabel} diperoleh sebesar 3,520 dengan demikian diketahui ($F_{hitung} 4,829 > F_{tabel} 3,520$) maka model layak digunakan atau model dapat digunakan. Dari hasil Signifikan F tersebut

menunjukkan besarnya nilai signifikansi 0,044 bila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 maka nilai sig 0,055, $p < \text{taraf } 0,05$ Sehingga dapat disimpulkan dari hasil analisis tersebut menolak H_0 , atau dengan kata lain model dapat digunakan.

Uji Secara Partial (Uji t)

Selanjutnya untuk melihat pengaruh variabel secara parsial:

Tabel 6. Variabel Y2, Retribusi Daerah
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.952	2.130		1.386	.215
PDB Pertambangan	.062	.019	.906	3.267	.017
1 PDB Industri Manufaktur	-.051	.048	-1.089	-1.056	.332
PDB Kontruksi	.283	.204	1.763	1.387	.215
PDB Perdagangan	.018	.060	.273	.303	.772

a. Dependent Variable: Retribusi Daerah

Pengujian yang dilakukan uji t (critical ratio), $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikan $< 0,05$ maka Hipotesis diterima (menolak H_0 dan menerima H_1) atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ nilai signifikan 0,05 maka Hipotesis ditolak (menerima H_0 dan menolak H_1), dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} hasil pengujian adalah sebagai berikut:

Pengaruh PDRB Pertambangan (X1) terhadap Retribusi Daerah (Y2)

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Pertambangan (X1) sebesar 0,062 jalur ini berpengaruh positif dan signifikan karena nilai t_{hitung} sebesar 3,267 sementara t_{tabel} sebesar 1,476 ($t_{hitung} = 3,267 > t_{tabel} = 1,476$), dengan demikian pada pola hubungan langsung ini, PDRB Pertambangan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah, yang didukung oleh Probability Value (sig) 0,017, $p < 0,05$. Jika PDB Pertambangan naik 1 persen, maka Retribusi Daerah akan meningkat sebesar 0,062 persen.

Pengaruh PDRB Industri Manufaktur (X2) terhadap Retribusi Daerah (Y2)

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDB Industri Manufaktur (X2) sebesar -0,051 jalur ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena nilai t_{hitung} sebesar -1,056 sementara t_{tabel} sebesar 1,476 ($t_{hitung} = -1,056 < t_{tabel} = 1,476$), dengan demikian pada pola hubungan langsung ini, PDRB Industri Manufaktur berpengaruh tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah, yang didukung oleh Probability Value (sig) 0,332, $p > 0,05$. Jika PDB Industri Manufaktur naik 1 persen, maka Retribusi Daerah akan menurun sebesar 0,051 persen.

Pengaruh PDRB Kontruksi (X3) terhadap Retribusi Daerah (Y2)

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Kontruksi (X3) sebesar 0,283 jalur ini berpengaruh positif dan tidak signifikan karena nilai t_{hitung} sebesar 1,387 sementara t_{tabel} sebesar 1,476 ($t_{hitung} = 1,387 < t_{tabel} = 1,476$), dengan demikian pada pola hubungan langsung ini, PDRB Kontruksi berpengaruh tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah, yang didukung oleh Probability Value (sig) 0,215, $p > 0,05$. Jika PDB Kontruksi naik 1 persen, maka Retribusi Daerah akan meningkat sebesar 0,283 persen.

Pengaruh PDRB Perdagangan (X4) terhadap Retribusi Daerah (Y2)

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Perdagangan (X4) sebesar 0,018 jalur ini berpengaruh positif dan tidak signifikan karena nilai t_{hitung} sebesar 0,303 sementara t_{tabel} sebesar 1,476 ($t_{hitung} = 0,303 < t_{tabel} = 1,476$), dengan demikian pada pola hubungan langsung ini, PDRB Kontruksi berpengaruh tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah, yang didukung oleh Probability Value (sig) 0,772, $p > 0,05$. Jika PDB Perdagangan naik 1 persen, maka Retribusi Daerah akan meningkat sebesar 0,018 persen.

Berdasarkan pengujian Hipotesis di atas, dapat dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pengaruh masing-masing variabel:

Pengaruh PDRB Sektor Pertambangan Terhadap Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Sektor Pertambangan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah (Y_1) Provinsi Kalimantan Timur. Hasil menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Pertambangan (X_1) sebesar 0,035 jalur ini berpengaruh positif dan signifikan didukung oleh Probability Value (sig) 0,009, $p < 0,05$. Hal tersebut dapat diartikan ketika PDRB Pertambangan meningkat maka akan meningkatkan Pajak Daerah namun signifikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fadhila Thunnisa, (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bukit Tinggi”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB dan Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Bukit Tinggi.

Menurut Suparmoko (2002) menjelaskan bahwa penerimaan negara adalah penerimaan pemerintahan yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Produk Domestik Bruto yang berasal dari sektor pertambangan memiliki pengaruh yang positif namun signifikan hal tersebut sesuai dengan realitasnya bahwa sebagian besar perekonomian Kalimantan Timur ditopang oleh sektor Pertambangan terutama Batubara. Dominasi lapangan usaha di sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Produk Domestik Regional Bruto Pertambangan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur dan yang berkontribusi tertinggi dengan andil sebesar 46 persen pada triwulan II-2019. Adapun sektor penyumbang kedua terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur yaitu Produk Domestik Regional Bruto dari Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 17,69 persen pada triwulan II-2019 di Kalimantan Timur. Ketiga Produk Domestik Regional Bruto sektor konstruksi yang memberikan peran sebesar 8,46 persen dan keempat merupakan Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan andil 7,86. Produk Domestik Regional Bruto sektor Pertambangan merupakan sektor yang paling tinggi dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur oleh sebab itu Produk Domestik Regional Bruto sektor Pertambangan sangat nyata mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Timur terutama yang berasal dari Pajak Daerah Kalimantan Timur.

Pengaruh PDRB Sektor Industri Manufaktur Terhadap Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Sektor Industri Manufaktur (X_2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah (Y_1) Provinsi Kalimantan Timur. Hasil menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Industri Manufaktur (X_2) sebesar -0,040 jalur ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan didukung oleh Probability Value (sig) 0,130, $p > 0,05$. Hal tersebut dapat diartikan ketika PDRB Sektor Industri Manufaktur meningkat maka akan meningkatkan Pajak Daerah namun tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dwi Sundi Marliyanti (2018) yang berjudul “Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh secara langsung signifikan terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Denpasar.

Menurut Mangkusubroto (1994) pajak merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya. Menurut Suparmoko (2002) menjelaskan bahwa penerimaan negara adalah penerimaan pemerintahan yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang punggung bagi penerimaan APBN maupun APBD daerah, sehingga kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sangat diperlukan terutama dalam sistem self assesment yang dianut perpajakan di Indonesia. Sikap patuh atau tidak

patuh merupakan salah satu sikap wajib pajak yang harus diperhatikan. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*) sebagai biaya transaksi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Kebanyakan Industri Manufaktur dalam kasus ini melakukan *tax saving* menggambarkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara yang legal. Dengan demikian pajak yang dibayarkan akan lebih kecil, sehingga besarnya tarif pajak efektif (TPE) perusahaan lebih kecil dan dapat diambil kesimpulan bahwa *discretionary tax avoidance* naik. Hal tersebut juga didukung dengan teori kekuasaan politik (*political power*) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk *tax planning*, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak untuk mencapai optimal *tax saving*. Adanya penghindaran pajak tersebut membuat negatif dan tidak signifikan variabel.

Pengaruh PDRB Sektor Kontruksi Terhadap Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Sektor Kontruksi (X_3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah (Y_1) Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat diartikan ketika PDRB Kontruksi meningkat maka akan meningkatkan Pajak Daerah namun tidak signifikan. Hasil menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Kontruksi (X_3) sebesar 0,069 jalur ini berpengaruh positif dan tidak signifikan didukung oleh Probability Value (*sig*) 0,508, $p > 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dwi Julia Mutiara, (2015) yang berjudul “Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Provnsi Kalimantan Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan dan memiliki hubunganyang positif secara statistik terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Menurut Suparmoko (2002) menjelaskan bahwa penerimaan negara adalah penerimaan pemerintahan yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Secara nasional nilai kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10,49 persen atau senilai Rp367,8 triliun. Sementara, PDB total triwulan I-2018 adalah Rp3.505 triliun. Secara hitungan tahunan atau year on year (yoy), kontribusi konstruksi mengalami peningkatan dengan pertumbuhan positif. Namun jika dibandingkan terhadap triwulan IV-2017 (kuartal to kuartal/qtq), maka ada penurunan pertumbuhan sektor konstruksi sebesar minus 4,60 persen. Begitu juga didaerah Provinsi Kalimantan Timur sektor konstruksi juga mendapatkan dampaknya terhadap positifnya pertumbuhan nasional.

Fenomena tersebut memiliki kesamaan dengan dengan hasil analisis. Ada beberapa penyebab sektor konstruksi tidak dapat dirasakan banyak oleh masyarakat dikarenakan proyek infrastruktur cenderung padat modal dan padat teknologi, sehingga *multiplier effect* masih kecil ke ekonomi khususnya ke kontraktor kecil. Sedangkan sektor properti yang meliputi sektor konstruksi dan real estate merupakan salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi, mempengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja maupun penerimaan pajak. Namun kenyataannya di Kalimantan Timur sektor konstruksi dan pembangunan properti masih sedikit dibanding dengan pusat hal tersebutlah yang menyebabkan kecilnya atau tidak signifikannya pengaruh Kontruksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Pengaruh PDRB Sektor Perdagangan Terhadap Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB Sektor Perdagangan (X_4) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah (Y_1) Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat diartikan ketika PDRB Sektor Perdagangan meningkat maka akan menurunkan Pajak Daerah namun tidak signifikan. Hasil menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Perdagangan (X_4) sebesar -0,052 jalur ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan didukung oleh Probability Value (*sig*) 0,124, $p > 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Reniwati, (2013) yang berjudul “Analisis Sektor Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan”. Hasil Analisis

Shift Share menunjukkan bahwa sektor yang berkembang pesat adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan persewaan, serta jasa- jasa.

Menurut Suparmoko (2002) menjelaskan bahwa penerimaan negara adalah penerimaan pemerintahan yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Pajak merupakan sebagian peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan yang surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*. Untuk menghimpun penerimaan pajak terdapat tiga perencanaan penerimaan pajak yaitu, *makro, mikro, incremental*. Penerimaan pajak dilihat dari sudut pandang ekonomi makro dapat ditunjukkan melalui perdagangan internasional yang diukur dari ekspor dan impor, *foreign direct investment* (FDI) dan *gross domestic product* (GDP).

Tabel 7. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Laju PDRB Sektor Perdagangan (%)
2014	5,13
2015	1,42
2016	2,74
2017	6,53

Berdasarkan tabel 7. PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuatif. Jika Produk Domestik Regional Bruto menurun atau lebih besar impor barang dan jasa dibanding ekspor akibat produk lokal kalah bersaing dari daerah lain maka akan menyebabkan sektor perdagangan pada daerah tersebut defisit atau negatif yang berdampak kepada penerimaan. Adapun terjadi fluktuatif membuat sektor perdagangan lesu diakibatkan tarif pajak yang terlalu tinggi dan tidak menerapkan tarif pajak efektif (TPE) agar para pedagang juga tidak dirugikan dalam berdagang.

Pengaruh PDRB Sektor Pertambangan Terhadap Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Sektor Pertambangan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Daerah (Y_2) Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat diartikan ketika PDRB Sektor Pertambangan meningkat maka akan meningkatkan Retribusi Daerah namun signifikan. Hasil menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Pertambangan (X_1) sebesar 0,062 jalur ini berpengaruh positif dan signifikan didukung oleh Probability Value (sig) 0,017, $p < 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suyatno, (2014) yang berjudul “Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jamkesmas terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Sragen Tahun 2007-2009”. Hasil Penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh Signifikan dan positif terhadap retribusi Pelayanan Kesehatan, Jumlah Penduduk Berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan, Jumlah jamkesmas Tidak mempunyai Pengaruh Terhadap retribusi Pelayanan Kesehatan.

Menurut Koho (20011) retribusi yang diserahkan cukup memadai, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas karena tidak semua jenis retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota memiliki prospek yang cerah. Lebih lanjut Koho memberikan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

1) Retribusi dipungut daerah; 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk; 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Semenjak kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan maka setiap Pemerintah daerah wajib mencari sumber penerimaannya sendiri baik dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk retribusi yang keseluruhannya merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Dalam menentukan penerimaan Pemerintah Daerah sendiri seperti Provinsi Kalimantan Timur menentukan mana yang lebih efektif antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut berkaitan dengan besarnya kontribusi penerimaan daerah yang berasal dari jumlah Pajak Daerah daripada Retribusi Daerah.

Adapun jenis retribusi yang ada di Kalimantan Timur yaitu jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu yang menjelaskan bahwa pungutan retribusi pada saat pengurusan perizinan pertambangan sangat nyata mempengaruhi pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi. Hal tersebut juga sejalan dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto sektor Pertambangan memberi kontribusi tertinggi kepada Produk Domestik Regional Kalimantan Timur yang berdampak juga kepada peningkatan retribusi daerah. Ketika perekonomian meningkat yang berasal dari sektor Pertambangan Batubara maka akan ikut meningkatkan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah sangat nyata.

Pengaruh PDRB Sektor Industri Manufaktur Terhadap Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Sektor Industri Manufaktur (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah (Y_2) Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat diartikan ketika PDRB Sektor Industri Manufaktur meningkat maka akan meningkatkan Retribusi Daerah namun tidak signifikan. Hasil menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDB Industri Manufaktur (X_2) sebesar -0,051 jalur ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan didukung oleh Probability Value (sig) 0,332, $p > 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dwi Julia Mutiara, (2015) yang berjudul “Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif secara statistik terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Menurut Koho (2011) retribusi yang diserahkan cukup memadai, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas karena tidak semua jenis retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota memiliki prospek yang cerah. Lebih lanjut Koho memberikan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut:

1) Retribusi dipungut daerah; 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk; 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Berdasarkan data lapangan menurut BPS Provinsi Kalimantan Timur, (2017) Perkembangan kegiatan kategori Industri Pengolahan Besar dan Sedang pada Triwulan III/2017 dalam periode tahunan (y-on-y) menunjukkan pertumbuhan yang positif namun pada periode triwulanan (q-to-q) menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Di Provinsi Kalimantan Timur, produksi Industri Pengolahan Mikro dan Kecil pada Triwulan III/2017 periode tahunan (y-on-y) meningkat sebesar 0,29 persen, sedangkan untuk pertumbuhan produksi triwulanan (q-to-q) meningkat sebesar 9,42 persen.

Fluktuatifnya Industri Manufaktur memberi dampak kepada tidak signifikannya penerimaan retribusi daerah. Namun jumlah retribusi tetap saja kecil karena retribusi daerah biasanya hanya akan dikenakan kepada perorangan baik itu jasa maupun kelompok dalam bentuk organisasi atau industry namun dipungut dalam jumlah yang kecil, tidak sebanyak pungutan pajak daerah dimana pungutan pajak daerah tersebut rata-rata dikenakan hampir disetiap kegiatan usaha. Adapun jumlah Industri manufaktur yang ada di Kalimantan Timur kebanyakan masih tergolong jenis yang kecil dan masih sedikit jumlah industry manufaktur tersebut jika dibandingkan daerah lain yang punya Industri manufaktur besar dan jumlahnya banyak.

Pengaruh PDRB Sektor Kontruksi Terhadap Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Sektor Kontruksi (X_3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah (Y_2) Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat diartikan ketika PDRB Sektor Kontruksi meningkat maka akan meningkatkan Retribusi Daerah namun tidak signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Kontruksi (X_3) sebesar 0,283 jalur ini berpengaruh positif dan tidak signifikan didukung oleh Probability Value (sig) 0,215, $p > 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ni Putu Ari Kusumayanti, (2018) yang berjudul “Analisis Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten di Bali di Luar Wilayah Sarbagita”. Hasil Penelitian menunjukkan Terdapat tiga sektor potensial di Kabupaten Karangasem yaitu Sektor Pertanian, Sektor Kehutanan dan Sektor Kontruksi dalam berkontribusi terhadap PAD ataupun Retribusi. Daerah.

Menurut Koho (2011) retribusi yang diserahkan cukup memadai, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas karena tidak semua jenis retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota memiliki prospek yang cerah. Lebih lanjut Koho memberikan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut:

1) Retribusi dipungut daerah; 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk; 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Kegiatan transaksi di sektor properti sebagian besar bersifat immobile menunjukkan sektor properti merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang berpotensi cukup besar dalam meningkatkan *local taxing power* baik melalui instrumen pajak daerah maupun melalui mekanisme bagi hasil pajak. Sektor properti yang meliputi sektor konstruksi dan real estate merupakan salah satu sektor penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi, mempengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Dampak perkembangan sektor properti secara nasional dan daerah memberi dampak terhadap peningkatan output perekonomian, pendapatan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Penerimaan pemerintah daerah dari sektor properti baik yang berbasis penghasilan, berbasis konsumsi, maupun berbasis kepemilikan masih terkonsentrasi di daerah-daerah yang bercirikan perkotaan (urban bias). Daerah perkotaan menikmati penerimaan dari sektor properti yang lebih besar utamanya dari PBB-P2 dan BPHTB, sementara di daerah pedesaan kurang menikmati pembangunan konstruksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa didesa masih kurang terjadi pembangunan atau tidak merata pembangunan kedaerah, oleh sebab itu kecilnya pengaruh sektor konstruksi dalam pengelolaan me

Pengaruh PDRB Sektor Perdagangan Terhadap Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Sektor Perdagangan (X_4) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah (Y_2) Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat diartikan ketika PDRB Sektor Perdagangan meningkat maka akan meningkatkan Retribusi Daerah namun tidak signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur antara PDRB Perdagangan (X_4) sebesar 0,018 jalur ini berpengaruh positif dan tidak signifikan didukung oleh Probability Value (sig) 0,772, $p > 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Diyan Aprilia Susanti, (2017) yang berjudul “Analisis Potensi Retribusi Pasar dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karang Anyar”. Hasil menunjukkan kegiatan perdagangan dipasar dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Koho (2011) retribusi yang diserahkan cukup memadai, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas karena tidak semua jenis retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota memiliki prospek yang cerah. ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut : 1) Retribusi dipungut daerah; 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk; 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Berdasarkan pada fenomena dilapangan adanya penghapusan pungutan retribusi dari perdagangan hasil pertanian antar daerah, khususnya komoditi ekspor. Sebagaimana dalam *Inception Report* (Persepsi Daerah, 1998) retribusi atas kegiatan tersebut seharusnya sudah dicabut berdasarkan tiga paket deregulasi berdasarkan: a) keputusan mendagri no. 48, 1984 dan no. 29, 1986 tentang penghapusan pungutan daerah terhadap komoditi ekspor hasil pertanian (perdesaan); b) perubahan UU tentang pajak dan retribusi daerah sebagaimana tertuang dalam UU No.18 1997.

Adanya pengaturan yang membatasi kebebasan pasar komoditi hasil pertanian, baik formal maupun informal. Adanya beberapa penghapusan pungutan retribusi berdasarkan pelayanan jasa tersebut berdampak kepada tidak signifikannya retribusi perdagangan. Namun membayar biaya atau komisi kelembaga tertentu dianggap membebankan para pedagang kecil oleh sebab itu segala macam pembatasan termasuk pungutan bagi pedagang dari berbagai macam pungutan wajib dihapus karena dianggap terlalu membebankan pedagang kecil. Oleh sebab itu penerimaan dari sektor perdagangan tidak signifikan terhadap retribusi daerah. Dalam hal ini para pedagang hanya membayar biaya

retribusi sewa lapak pasar ketika ingin berdagang atau izin usaha saja ketika mendirikan toko untuk berdagang.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Namun pada tahun setelahnya yaitu tahun 2010-2012 pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur mulai menggali pendapatan asli daerahnya yang berasal dari Pajak Daerah, kemudian hal tersebut dapat dijelaskan dengan data Grafik 5.1. yang menunjukkan terjadi peningkatan pada kontribusi pajak daerah pada tahun 2010-2013 diakibatkan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menggali sumber pendapatan asli daerahnya yang berasal dari Pajak Daerah guna untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah atau melakukan kebijakan menuju kemandirian desentralisasi fiskal daerah.

Komponen Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada umumnya mengalami peningkatan. Peningkatannya selain didorong oleh upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan yang selama ini dilakukan, juga dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Kalimantan Timur yang cenderung terus membaik, yang implikasinya akan mengefektifkan penerimaan pajak daerah dan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Pada tahun 2013 kontribusi pajak daerah kembali mengalami penurunan hal tersebut dipengaruhi terhadap turunnya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto sektor Pertambangan yang merupakan tumpuan perekonomian Kalimantan Timur pada tahun sebelumnya 2012. Sedangkan pada tahun 2014-2018 pajak daerah rata-rata mengalami penurunan, hal tersebut diakibatkan mulai turunnya Produk Domestik Regional Bruto Pertambangan diakibatkan turun dan jatuhnya harga komoditas pertambangan terutama Batubara yang merupakan sektor andalan Kalimantan Timur. Rendahnya kontribusi Pajak Daerah dikarenakan rendahnya pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah, hal tersebut berkaitan dengan menurunnya kinerja sektor Produk Domestik Regional Bruto yang berasal dari Pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kinerjanya, pada tahun 2011-2014 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Pertambangan sangat tinggi.

Namun tahun 2015-2017 rata-rata terjadi penurunan akibat jatuhnya komoditas atau rendahnya harga komoditas sektor andalan Kalimantan Timur yang berasal dari Pertambangan. Komoditas Pertambangan pada tahun 2015 tersebut mengalami kelebihan pasokan dipasar dunia atau melimpah ruah yang mengakibatkan komoditasnya harga menjadi turun atau harganya jatuh dipasar dunia. Kontribusi Pajak Daerah merupakan formulasi berdasarkan perhitungan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah sendiri memiliki banyak sektor terdiri dari Pertambangan, Industri Manufaktur, Kontruksi, Perdagangan dan sebagainya. Sektor tersebutlah yang memberi kontribusi kepada Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun Retribusi Daerah Kalimantan Timur dari tahun 2008-2013 mengalami peningkatan akibat meningkatnya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto sektor Pertambangan. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah menurunnya kontribusi retribusi daerah pada tahun 2014-2017 juga dipengaruhi oleh turunnya distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Pertambangan pada tahun 2014-2017. Hal tersebut juga sejalan dengan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah. Ketika harga komoditas pertambangan turun yang merupakan tumpuan perekonomian Kalimantan Timur maka berdampak pada penurunan kontribusi retribusi daerah.

Pada tahun 2014-2017 Grafik 5.2. menunjukkan retribusi yang sumbernya berasal dari pemberian izin dan pungutan juga ikut berdampak. Hal tersebut diakibatkan menurunnya perekonomian yang bersumber dari pertambangan Batubara. Ketika harga batubara mulai anjlok beberapa perusahaan tutup yang menyebabkan gagal bayar pada tagihan retribusi. Oleh sebab itu retribusi cenderung turun atau stabil pada tahun tersebut. Pemerintah daerah saat ini diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera, dilakukan dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu dibutuhkan guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung belum optimal. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. Sedangkan dalam melakukan ekstensifikasi perlu kehati-hatian dalam mencari sumber baru karena jika terlalu luas melakukan pungutan maka akan berdampak kepada lesunya perekonomian.

Ekstensifikasi merupakan kegiatan memperluas atau memperlebar sektor pungutan yang ada pada pajak dan retribusi juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat itu kembali. Jika dipaksakan maka perekonomian masyarakat akan melemah atau lesu. Untuk meningkatkan intensifikasi pajak dan retribusi maka fungsi dari dukungan teknologi informasi dapat digunakan dalam pembayaran pajak dan retribusi dengan cara online. Dengan adanya Teknologi Informasi pemerintah daerah dapat membuat aplikasi yang lebih praktis untuk masyarakat dan mudah diakses mulai dari perangkat komputer, table, smartphone, melalui ATM dan sistem pembayaran lainnya maka akan semakin mudah pemerintah daerah dapat meningkat pajak. Seseorang tidak perlu mengantri membayar pajak dan retribusi keinstansi yang bersangkutan. Dengan adanya Teknologi Informasi pemerintah daerah dapat membuat aplikasi yang mudah dipahami masyarakat untuk melakukan pembayaran. Selain itu retribusi dari jasa perekonomian juga dipengaruhi faktor ekonomi makro, ketika ekonomi makro tumbuh maka retribusi dari perhotelan, restaurant, parkir juga dapat ditingkatkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan pengujian hipotesis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pengaruh PDRB Sektor Pertambangan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Daerah (Y_1) Provinsi Kalimantan Timur;

Pengaruh PDRB Sektor Industri Manufaktur (X_2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah (Y_1) Provinsi Kalimantan Timur;

Pengaruh PDRB Sektor Kontruksi (X_3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah (Y_1) Provinsi Kalimantan Timur;

Pengaruh PDB Perdagangan (X_4) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pajak Daerah (Y_1) Provinsi Kalimantan Timur;

Pengaruh PDRB Sektor Pertambangan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Daerah (Y_2) Provinsi Kalimantan Timur;

Pengaruh PDRB Sektor Industri Manufaktur (X_2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah (Y_2) Provinsi Kalimantan Timur;

Pengaruh PDRB Sektor Kontruksi (X_3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah (Y_2) Provinsi Kalimantan Timur;

Pengaruh PDRB Sektor Perdagangan (X_4) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Retribusi Daerah (Y_2) Provinsi Kalimantan Timur;

Hasil analisis menunjukkan variabel Pajak Daerah cenderung menurun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel Pajak Daerah memiliki kontribusi yang lebih kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah dibanding kontribusi Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan

Hasil analisis menunjukkan variabel Retribusi Daerah cenderung meningkat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel Retribusi Daerah memiliki kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dibanding kontribusi Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunawa,V.and J.O. Nomuoja. 2012. *The Impact Of Capital Expenditure In The Nigeria Public Sector On Economic Growth*. Departement Of Banking Financeand Departement Of Business Administration: Delta State.
- Agus Wahyu Widodo. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Tahun 1991-2010*. Universitas Jember. Jember.
- Amelia, A. 2010. *Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal, Investasi Swasta Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anasmen. 2009. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera barat: 2000-2006*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Indonesia. Depok
- BPS,. 2018. *Kalimantan Timur Province in Figure*. BPS Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Kemitraan partnership. Jakarta.
- Darise,N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dan BLU*. Indeks. Jakarta.
- Dwi Julia Mutiara,. 2015. *Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur*. E-Jurnal. Indonesia.
- Dwi Sundi Marliyanti,. 2014. *Pengaruh PDRB terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar*. E-Jurnal. Universitas Udayana.
- Diyan Apriliya Susanti,. 2017. *Analisis Potensi Retribusi Pasar dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Karang Anyar*. FEB Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Fadhila Thunnisa,. 2018. *Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bukit Tinggi*. FE Universitas Andalas. Padang.
- Gujarati, D.N. 2007. *Dasar-dasar ekonometrika*. Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Iskandar,M.A. 2012. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Periode 2006-2010*.Tesis Tidak Dipublikasikan. Universitas Indonesia. Depok.
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lucky, D. 2011. *Analisis Pengaruh Variabel Penerimaan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi: Studi Kasus Kabupaten / Kota Wilayah Keresidenan Malang Tahun 2004-2009*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Lukman. 2011. *Struktur Dan Dampak Sektor Unggulan Ekonomi*. UNPAD PRESS. Bandung.
- Mubarog, M. dkk. 2013. *Pengaruh investasi pemerintah, tenaga kerja dan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten diIndonesia tahun 2007-2010*. Bapeda Kota Cimahi, Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran.

-
-
- Ni Putu Ari Kusumayanti. 2018. *Analisis Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten di Bali diluar Wilayah Sarbagita*. E Jurnal Manajemen Unud. Bali.
- Murni,A. 2006. *Ekonomika Makro*. Bandung: RefikaAditama
- Nachrowi,N.D dan H. Usman. 2008. *Penggunaan Teknik Ekonometrik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Perwira, Ryan, dkk. 2018. “*Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan, dan Jumlah Penduduk Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah*”, E-Jurnal Katalogis, Vol. 6, No. 2: 1-15. ISSN 2302-2019.
- Prakarsa,R.dkk.2010. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Decade Terakhir*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Veteran Surabaya. Surabaya.
- Pratiwi, Iin Eko. 2015. “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2013*”. Jurnal Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Reniwati,. 2013. *Analisis Sektor Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan*. FEB Unhas. Makassar.
- Rodriguez, A. and A.Kroijer. 2009. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe*. LSE.
- Sari, Silvia Mira, dkk. 2016. “*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014*”. Jurnal Universitas Bung Hatta. Vol. 9. No. 1: 1-10.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sunandar, Gufron Reynaldin. 2017. “*Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014)*”. Jurnal Universitas Islam Indonesia.
- Suyatno,. 2014. *Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Jamkesmas terhadap Retribusi Pelayanan*. Universitas Sebelas Maret Pasca Sarjana. Surakarta.
- Tarigan, Robinson. 2010. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Usman, Regina. 2017. “*Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015)*. Jurnal of Accounting and Finance. Vol. 1. No. 1: 1-17. ISSN: 2581-1088.
- Zahari. 2016. “*Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun*”. Jurnal Eksis. Vol. 7, No. 2: 133-148.